

PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT

Yanti Shantini¹

ABSTRAK

Permasalahan yang melatarbelakangi penulis ialah 1) rendahnya tingkat ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, 2) hambatan yang bersifat sosial, fisik dan arsitektural yang menghalangi akses hidup, serta 3) perlakuan yang diskriminatif dari lingkungan, masyarakat dan Pemerintah. Kenyataan di atas merupakan pemandangan sehari-hari yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat bagi penyandang cacat.

Dari permasalahan tersebut penulis mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat, sehingga didapat pertanyaan penelitian, diantaranya: 1) bagaimana deskripsi tahapan penyelenggaraan program yang dilakukan oleh lembaga dalam upaya pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Cicendo Bandung?, 2) bagaimana deskripsi rancangan model konseptual yang diterapkan dalam program pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Cicendo Bandung?. 3) bagaimana kendala dan permasalahan apa saja yang dialami pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam kegiatan pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Cicendo Bandung?

Dari hasil kajian dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya adalah: 1) Program pemberdayaan penyandang cacat melalui pembentukan POKJA memberikan tuntutan untuk memberikan nilai tambah yang baik kepada peserta program, agar program memiliki nilai outcome yang tinggi. 2) Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo memandang bahwa proses pembelajaran memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh sehingga nilai tambah kecakapan hidup yang diberikan kepada peserta program memiliki daya guna yang optimal.

Kata Kunci: *Kelompok Kerja, Penyandang Cacat, Pemberdayaan.*

A. Pendahuluan

Penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dan menjadi rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Kecacatan menyangkut cacat fisik, cacat mental serta cacat fisik dan mental. Peristilahan yang dipakai untuk penyandang cacat sangat beragam dan berkembang, mulai dari *cripple*, *handicap*, *impairment*, hingga *diffable* yang berasal dari kata *different ability*. Terlepas dari berbagai kata dan pengertian yang dipakai berbagai kelompok, sesungguhnya hal yang paling penting adalah bagaimana kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban serta peran penyandang cacat dapat terwujud.

Mewujudkan kesamaan dan peran tersebut bukanlah hal yang mudah. Persoalan pemahaman, paradigma dan perlakuan masyarakat yang terjadi di kehidupan pada difabel menjadi penyebabnya. Selain kebijakan negara yang kurang melindungi hak mereka, di masyarakat juga masih melekat berbagai stigma seperti penyandang cacat adalah beban, orang yang tidak berguna dan tergantung pada orang lain. Kondisi tersebut menyebabkan

kelompok *diffable* sebagai kelompok masyarakat yang sering tidak mendapatkan hak-hak sebagai mana mestinya.

Seorang pengamat kaum difabel bahkan menyatakan bahwa kelompok masyarakat difabel ini sebagai kelompok masyarakat yang paling miskin di antara yang miskin, kelompok paling tertindas di antara yang tertindas. Keterbatasan dan diskriminasi dalam akses pendidikan bagi anak penyandang cacat, kurangnya pelatihan dan kesempatan kerja, sulitnya akses untuk perawatan kesehatan termasuk informasi kesehatan reproduksi dan seksual bagi perempuan penyandang cacat, jaminan mendapat alat bantu, permasalahan kesetaraan perempuan penyandang cacat, kurangnya akses terhadap sarana air bersih, informasi dan teknologi, kemiskinan dimana 20-30% diantara orang miskin adalah penyandang cacat dan 90% dari jumlah penyandang cacat adalah buta huruf (*Yutaka Takamine, Disability Issues in East Asia: Review and Ways Forward*), aksesibilitas lingkungan fisik (meliputi jalan, bangunan, dan perumahan) yang sangat buruk, tidak adanya sarana transportasi umum yang aksesibel sehingga sangat menyulitkan penyandang cacat untuk mengakses tempat pelayanan publik itu sendiri, kesetaraan kesempatan berperan aktif dalam pembangunan serta menikmati, kesempatan berperan dalam mengambil kebijakan, diskriminasi dalam hukum, tidak adanya statistik yang akurat, serta sikap masyarakat yang masih negatif dengan stigma dan prasangka buruk terhadap penyandang cacat. Semua itu adalah permasalahan penyandang cacat yang sampai saat ini masih sangat dirasakan.

Pada tahun 2000, WHO memperkirakan jumlah penyandang cacat sebanyak 10% dari populasi penduduk. Menurut BPS tahun 2000 bahwa 65.6% penyandang cacat tinggal di pedesaan serta 34.2% tinggal di perkotaan dan 55.7% adalah perempuan (*Country Profile Republic of Indonesia, APCD*). Data kependudukan berdasarkan hasil sensus Demografi dan Kesehatan yang diadakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2002 s.d. 2003 menunjukkan populasi penyandang cacat adalah sebesar 5% dari total populasi penduduk Indonesia, atau kurang lebih 10 juta jiwa penyandang cacat yang ada di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif sasaran pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat adalah tidak sedikit, dan memerlukan penanganan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tahapan penyelenggaraan program yang dilakukan oleh lembaga dalam upaya pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Cicendo Bandung?
2. Bagaimana deskripsi rancangan model konseptual yang diterapkan dalam program pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Cicendo Bandung?
3. Bagaimana kendala dan permasalahan apa saja yang dialami pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam kegiatan pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Cicendo Bandung?

B. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari upaya pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat adalah diperolehnya suatu pola yang dapat membantu para penyandang cacat sehingga dapat menjadi bagian masyarakat yang berfungsi penuh, menyeluruh dan terpadu, dengan memperhatikan aspek keberfungsian dan ketidakmampuan para penyandang cacat. Sedangkan secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mendeskripsikan tahapan penyelenggaraan program yang dilakukan oleh lembaga dalam upaya pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Cicendo Bandung.
2. Mampu mendeskripsikan rancangan model konseptual yang diterapkan dalam program pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di sekolah luar biasa cicendo Bandung.
3. Mampu menjelaskan kendala dan permasalahan apa saja yang dialami pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam kegiatan pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Cicendo Bandung.

C. Penyusunan Kerangka Teoritis

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan social. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: 1) Inklusi dan Partisipasi; 2) Akses Pada Informasi; 3) Kapasitas Organisasi Lokal; dan (4) Profesionalitas Pelaku Pemberdaya. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri.

Di dalam melakukan suatu pemberdayaan maka perlulah kita mengetahui dan melakukan berbagai tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu pemberdayaan karena Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, yaitu:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kesadaran tinggi.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Pengembangan pemberdayaan di dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan melalui pola “Pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat”. UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental , serta penyandang cacat fisik dan mental (ganda). Dengan mengacu pada konsep tersebut, maka pola pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat adalah membentuk partisipatif dan peran yang tidak hanya meninjau aspek fisik namun aspek juga lingkungan perlu diperhatikan. Dengan kata lain faktor-faktor di luar individu, misalnya, yang berasal dari masyarakat seperti hambatan arsitektural, atau hambatan non fisik berupa sikap atau perlakuan yang perlu mendapat perhatian yang khusus dari POKJA pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat.

Eva Rahmi Kasim, MDS seorang praktisi dan pemerhati permasalahan penyandang cacat menyampaikan dua model yang dapat dipakai dalam kebijakan masalah penyandang cacat, yaitu :

- 1) Model Individu. Model ini didasari pada penggunaan strategi medis atau yang disebut juga strategi individual karena fokusnya pada individu penyandang cacat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan konsep rehabilitasi pada program-program yang ditujukan kepada penyandang cacat dan pembentukan organisasi pelayanan yang diperuntukan bagi penyandang cacat.

- 2) Model Sosial. Model Sosial umumnya beranjak dari pemikiran bahwa, hambatan-hambatan yang berasal dari luar lingkungan, yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang yang mengalami impairment dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terjadi karena lingkungan tidak mengakomodasi kebutuhan warga negara penyandang cacat.

Berdasarkan pemahaman kebijakan masalah penyandang cacat pada dua model di atas, dapat menjadi dasar dalam membuat pola pemberdayaan penyandang cacat melalui *pengembangan pola rehabilitasi vokasional*. Pengembangan yang dimaksud adalah menempatkan integrasi kebijakan model individu dan model sosial dalam pola rehabilitasi vokasional. UU No. 4 Tahun 1997, Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa “Rehabilitasi vokasional adalah kegiatan pelayanan secara utuh dan terpadu agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya”.

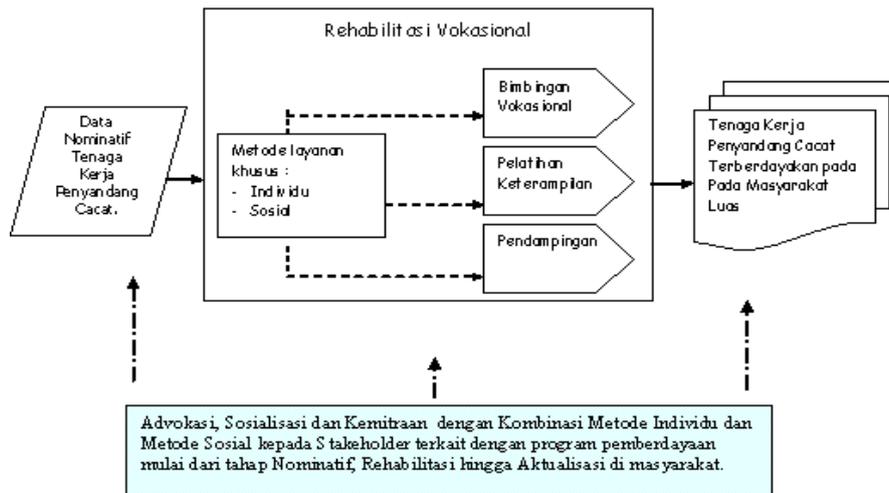
Bentuk dari rehabilitasi vokasional ini salah satunya adalah pelatihan bagi penyandang cacat. Pelatihan ini merupakan suatu rangkaian proses pembelajaran. pembelajaran merupakan suatu konsep dalam mengembangkan keaktifan, baik keaktifan instruktur maupun keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran juga merupakan upaya yang dilakukan instruktur dengan dimulai dari persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu proses interaksi pendidikan antara instruktur dan peserta didik dengan adanya hubungan interaksi keduanya sehingga adanya suatu timbal balik.

Beberapa prinsip atau kaidah dalam proses pembelajaran sebagai hasil eksperimen para ahli psikologi yang berlaku secara yaitu : motivasi, pembentukan, kemajuan dan keberhasilan proses belajar mengajar, *feedback, response, trial and error, transfer* dalam belajar dapat bersifat positif atau negatif dan proses belajar yang bersifat individual. Dalam konteks pembelajaran, strategi merupakan suatu cara yang dipergunakan oleh pendidik untuk dapat menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan belajar peserta didik. Sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. Langkah-langkah Pembelajaran mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut.

D. Metodologi Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan penyandang cacat, melalui pembentukan model kelompok kerja (POKJA) di Kota Bandung. Data diperoleh berdasarkan keadaan yang sedang terjadi dengan menggunakan perangkat instrumen berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi terhadap sampel yang dipilih. Penelitian ini juga difokuskan pada pengembangan model kelompok kerja (POKJA) pemberdayaan penyandang cacat. Data diperoleh berdasarkan beberapa kali penelitian dengan menggunakan perangkat instrumen secara komprehensif. Untuk pengembangan model, digunakan prosedur riset dan pengembangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam praktiknya, prosedur riset dan pengembangan itu di dalamnya juga menggunakan metode deskriptif.

Variabel dan operasional variabel dalam penelitian ini, dijelaskan dalam bagan berikut ini:



Gambar 3.2 Model Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik sekolah luar biasa Negeri Cicendo sebanyak 57 orang. Yaitu siswa dan siswi yang berada pada sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 32 orang dan siswa/i yang berada pada sekolah menengah atas sebanyak 25 orang. Penelitian ini dilakukan terhadap peserta pelatihan model kelompok kerja pemberdayaan penyandang cacat sebanyak 20 orang, dengan jenis keterampilan menjahit. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan pengamatan langsung selama penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, menggunakan kuesioner kepada informan, responden, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta diskusi kelompok fokus. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan adalah berbagai data yang berfungsi melengkapi data primer, yang telah diolah dengan cara tertentu dan tersedia pada lembaga-lembaga formal dan nonformal. Data tersebut berwujud dokumen yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

E. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumen yang dilakukan secara terpisah diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tahapan penyelenggaraan program dalam upaya pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat ini terdiri dari tiga tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan program pendampingan.
 - a. Tahap persiapan, terdiri dari: 1) Menyusun proposal kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Ditjen dikti mengenai program Penelitian Strategi Nasional (*Stranas Batch 1*); 2) Melakukan koordinasi dan penyiapan perangkat atau pelaksana program penelitian strategi nasional; 3) Melakukan *assessment* minat dan kebutuhan peserta didik (peserta), serta kajian lapangan, berkenaan dengan kondisi sosial budaya serta potensi dan permasalahan pendukung lainnya, di lingkungan wilayah sasaran; 4) Menyusun desain model dan menyiapkan instrumen penyelenggaraan program pemberdayaan penyandang cacat melalui pembentukan POKJA; 5) Melakukan diskusi teknis dengan pihak SLB Cicendo, mulai dari Dinas terkait, Kepala Sekolah, Guru dalam upaya menjalin kerja sama atau kemitraan dan dukungan program penelitian.
 - b. Tahap pelaksanaan pengembangan program pemberdayaan penyandang cacat melalui pembentukan POKJA ini, secara garis besar meliputi enam kegiatan utama, yaitu: sosialisasi program kelompok kajian, rekrutmen peserta pelatihan, penyaluran, kelompok usaha dan kegiatan pendampingan.

- c. Program pendampingan ditujukan untuk membangun pola dan sistem latihan bekerja yang mendekati kualifikasi kebutuhan yang standar dari layanan jasa dan produk. Sehingga diharapkan tumbuhnya motivasi dan kepercayaan diri dari peserta untuk terus berkembang dan berusaha.
2. Rancangan model konseptual yang diterapkan dalam program pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat ini ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan peserta didik di SLBN Cicendo. Model konseptual yang berhubungan dengan tujuan peningkatan mutu layanan diperoleh dari pemahaman dan penerapan secara konseptual tentang: 1) model bahan ajar yang dikembangkan mulai dari rancangan materi bahan ajar, dan penyiapan bahan ajar yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik yang ada di SLB Cicendo. 2) model strategi, metode, dan media pendidikan dalam pembentukan kelompok kerja yang secara hipotetik dianggap dapat meningkatkan mutu layanan belajar terutama dihubungkan dengan kemampuan dan penguasaan kompetensi peserta didiknya. 3) pengembangan model evaluasi hasil pembentukan kelompok kerja yang dapat membangun dan meningkatkan mutu layanan belajar bagi peserta didik yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo serta seluruh staf pengajarnya.
3. Kendala dan permasalahan dalam kegiatan pembentukan kelompok kerja pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat, diantaranya:
 - a. Hambatan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga pelaksanaan pembelajaran agak pasif.
 - b. Tutor dan fasilitator tidak sepenuhnya mengetahui tentang bahasa isyarat yang digunakan oleh peserta didik, sementara peserta didik membutuhkan informasi yang berkaitan dengan keterampilan menjahit.
 - c. Peserta didik belum secara aktif mengungkapkan ide/gagasannya terkait dengan topik pembelajaran.
 - d. Kurangnya referensi dan bahan-bahan bacaan yang terkait dengan topik pembelajaran pelatihan menjahit.
 - e. Peserta didik belum bisa mengenali potensi diri yang ada pada dirinya, hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan dan kepekaan (*sensitifitas*) terhadap diri dan masalah yang dihadapi terkait dengan perubahan situasi dan kondisi di luar dirinya.
 - f. Penyelenggara program keterampilan menjahit dalam hal ini pengelola SLB dan mitra keterampilan menjahit melalui pembentukan POKJA penyandang cacat belum mampu menciptakan jaringan kemitraan dalam mengembangkan program Kegiatan Usaha Bersama (KUB) dengan kebutuhan pasar (*market*)

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Program pemberdayaan penyandang cacat melalui pembentukan POKJA memberikan tuntutan untuk memberikan nilai tambah yang baik kepada peserta program, agar program memiliki nilai *outcome* yang tinggi. Dalam pengertian kualitas *output* dapat memenuhi tujuan dan hasil yang diharapkan. Untuk proses awal menyangkut disain dan persiapan awal program memerlukan perhatian yang khusus, dimana kualitas input akan menentukan kualitas output yang dihasilkan.
- b. Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo memandang bahwa proses pembelajaran memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh sehingga nilai tambah kecakapan hidup yang diberikan kepada peserta program memiliki daya guna yang optimal.

Untuk itu kesesuaian kebutuhan kecakapan hidup dengan bidang garapan yang ada di masyarakat sekitar khususnya potensi lingkungan menjadi salah satu pertimbangan dari pihak sekolah dengan menjadikan para peserta didik dapat mengikuti program pemberdayaan melalui pembentukan POKJA untuk lebih meningkatkan kemampuan vokasional peserta didiknya. Selain itu diharapkan akan memberikan peningkatan kualitas hidup melalui penambahan kemampuan *skill* yang mendukung dan memperkuat garapan yang sedang dijalankan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dibuat rekomendasi untuk para pihak yang terkait diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan melalui pembentukan POKJA untuk lebih meningkatkan kemampuan vokasional peserta didiknya dan pihak pengelola lembaga harus lebih semakin profesional dalam melaksanakan program pemberdayaan melalui pembentukan POKJA untuk lebih meningkatkan kemampuan vokasional peserta didiknya.
- b. Fasilitator. Peran Fasilitator dalam program pemberdayaan melalui pembentukan POKJA sangat besar sehingga fasilitator harus memusatkan perhatian pada peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta didik untuk selalu memotivasi mereka dalam mengikuti program pemberdayaan melalui pemberian keterampilan. Fasilitator harus lebih banyak terlibat di dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui pembentukan POKJA sehingga mampu meningkatkan motivasi dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti program pemberdayaan.
- c. Peserta didik. Peserta didik diharapkan agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik, memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk berubah dengan memperbaiki diri, dengan cara mengikuti kegiatan pembentukan kelompok kerja diarahkan lebih kepada pengembangan program pemberdayaan peserta didik sebagai sasaran didik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengenai pemanfaatan hasil belajar khususnya yang berhubungan dengan pendidikan kecakapan hidup (*vocational skills*) dengan memperhatikan aspek keberfungsian dan ketidakmampuan penyandang cacat melalui bimbingan vokasional, pelatihan keterampilan, serta program magang, untuk membantu para penyandang cacat sehingga dapat menjadi bagian masyarakat yang berfungsi penuh, menyeluruh dan terpadu, dengan memperhatikan aspek keberfungsian dan ketidakmampuan para penyandang cacat.

G. Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad dkk (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Pedagogiana Press
- Alma, Bukhori (2005). *Kewirausahaan*. Bandung : Alfa Beta.
- Coombs, P.H and Manzoor, Ahmed (1978). *Attacking Rural Goverty How Non Formal Education Can Help*. Baltimore : The John Hopkins Press.
- Dirjen PLSP. (2004). *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Ditjen PLSP
- Ditjen PLS (2003). *Program Life Skills Melalui Pendekatan Broad Based Education (BBE)*. Jakarta : Direktorat Tenaga Teknis Depdiknas.
- Duadji, N (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Desa : Survival Strategies Masyarakat Miskin dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Hidup (Tesis)*. Malang : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Departemen PU (2007). *Modul Tingkat Dasar Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ihat, Hatimah dan Sardin (2007) *Modul Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*, Bandung : Universitas Terbuka UPBJJ Bandung,

Ihromi T.O. (1996). *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Kartasmita, Ginanjar. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta : UGM.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1998). Jakarta : Balai Pustaka.

Krect et al. (1993). *Individual In Society*. New York : Mc. Graw Hill Book Company, Inc .

Margono (1996). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rhimeka Cipta.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991. (1991). *Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta : Ekojaya

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Jakarta : Depdiknas

Sumber lainnya :

Olim, Ayi. (1999). *Kemampuan Membelajarkan Diri Pemuda Pelopor dan Pengembangannya*. Bandung : Disertasi PPS IKIP Bandung

Rifaid. (2003). *Dampak Pelatihan Keterampilan terhadap Perubahan Sikap dan Prilaku serta Kemandirian Bekas Wanita Tuna Susila (WTS). di NTB*. Bandung : PPS UPI. Tesis PPS UPI.

Mujani, Ridwan (2002). *Dampak Program Pelatihan Keterampilan Mekanik Mobil Terhadap Kemandirian Peserta Didik Pencari Kerja*. Bandung : PPS UPI, Tesis PPS UPI.

Hasanudin, Apidin (2005). *Dampak Pelaksanaan Program Pelatihan Kecakapan Hidup (Life Skills) Budi daya Tanaman Pisang Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Sunten Jaya Kec. Lembang Kab. Bandung*. Bandung : Tesis PPS UPI.

¹ Penulis adalah Dosen Jurusan PLS FIP UPI